

**EFEKTIVITAS KEMITRAAN PEMERINTAH DAN SWASTA
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN:
SEBUAH TINJAUAN LITERATUR**

***EFFECTIVENESS OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
IN THE POVERTY REDUCTION: A LITERATURE STUDIES***

Didi Rasdi

Program Magister Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
email: lima.bahasa@gmail.com

Teguh Kurniawan

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Indonesia
email: teguh.kurniawan@ui.ac.id

Abstrak

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan terbesar di dunia. Permasalahan tersebut membutuhkan solusi yang komprehensif. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan yaitu dengan melakukan kemitraan antara pemerintah dan swasta (*public-private partnership*). Pada dasarnya, kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta berdampak pada efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, meskipun berbagai permasalahan dan kendala kerap ditemui dalam pelaksanaan kemitraan tersebut. Kendala yang ditemui berupa ketiadaan tujuan yang jelas maupun potensi kerugian lainnya. Artikel ini menggunakan analisis studi literatur pada jurnal, buku, maupun berita tentang efektivitas kemitraan pemerintah dan swasta terutama dalam rangka menanggulangi kemiskinan. Hasil analisis mengindikasikan bahwa kemitraan kerap dijadikan sebagai salah satu solusi untuk mengatasi kemiskinan di berbagai bidang, seperti infrastruktur, pengembangan ekonomi kecil dan menengah, *corporate social responsibility* (CSR), dan program pemerintah di negara-negara berkembang. Dalam mencapai efektivitas kemitraan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dapat menggunakan model kemitraan yang mempunyai konteks pada pengembangan ekonomi dengan dimensi seperti tujuan dan strategi kemitraan, aktor yang terlibat, lokasi, waktu serta mekanisme kemitraan yang akan dijalankan. Dimensi lain yang dapat digunakan yaitu kesetaraan, inklusi sosial, dan pemberdayaan.

Kata Kunci: *efektivitas, kemitraan pemerintah dan swasta, penanggulangan kemiskinan.*

Abstract

Poverty has been identified as one of the world's biggest problems. These problems require a comprehensive solution. One of the solutions that can be done to reduce poverty is through public-private partnerships (PPP). Basically, the public and private partnership undertaken will have an impact on the effectiveness of poverty reduction, although various problems and obstacles are often encountered in the implementation of these partnerships. The kind of the obstacle such as lack of the clear goal and the other potensial disadvantages. This paper uses an analysis literature studies in several journals, books, and news about the effectiveness of public-private partnerships, especially in the context of poverty reduction. The results of the analysis indicate that partnerships are often used as one solution to poverty reduction in various aspect, such as infrastructure, small and medium economic development, corporate social responsibility (CSR), and government programs in developing countries. In achieving partnership effectiveness as an effort to reduce poverty can use a partnership model that has a context on economic development with dimensions such as partnership purposes and strategies, key actors, location, time and the mechanism of partnership to be implemented. Other dimensions that can be used are equality, social inclusion, and empowerment.

Keyword: *Effectiveness, public-private partnership, poverty reduction.*

PENDAHULUAN

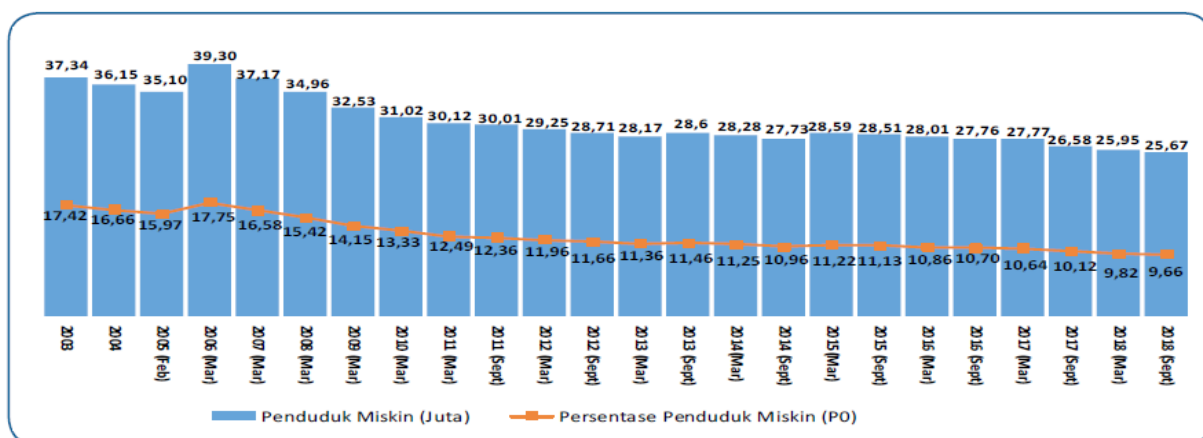
Kemiskinan merupakan permasalahan yang dihadapi oleh semua negara di dunia. Menurut Fombad (2018), kemiskinan dipandang sebagai sebuah tantangan yang dihadapi oleh berbagai negara dan terbukti bahwa upaya-upaya yang dilakukan tidak berhasil mengatasi kemiskinan. Sehingga permasalahan tersebut menggerakkan masyarakat dunia dalam upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dengan mendorong setiap negara untuk terlibat dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG's) dengan salah satu kunci kesuksesannya adalah negara tanpa kemiskinan. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDG's) merupakan kelanjutan dari gerakan sebelumnya yaitu *Millenium Development Goals* (MDGs). The Smeru Institute (2017) menyatakan bahwa "*The Sustainable Development Goals (SDGs) are recognized as the global development agenda with a wider and more inclusive mandate than the Millennium Development Goals (MDGs) which ended in 2015*". Diharapkan dengan dilaksanakannya gerakan pembaharuan melalui SDG's, upaya setiap negara menjadi lebih terfokus dan sejalan untuk menanggulangi kemiskinan.

Menurut Sumodiningrat (2003), selama kemiskinan masih berada pada tingkat yang

membahayakan, maka bisa disampaikan bahwa pembangunan yang dilakukan suatu negara belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan warga negara. Bahkan menurut Kotler & Lee (2009), kemiskinan berpotensi menimbulkan dampak pada masalah serius lainnya yang akan dihadapi oleh negara.

Dalam pembahasan mengenai kemiskinan, fokus utama yang harus dilakukan adalah bagaimana upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Upaya penanggulangan kemiskinan terletak pada bagaimana suatu negara menurunkan angka kemiskinan. Secara umum, pada periode 2009–2019 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Target yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019 berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sebesar 7-8 %. Pada periode September 2018, angka kemiskinan Indonesia berada pada 9.66 %. Hal tersebut menandakan diperlukan adanya upaya yang lebih massif dalam mencapai target sebesar 7-8 % yang diagendakan sampai dengan tahun 2019. Perkembangan angka kemiskinan dari tahun 2003 sampai September 2018 disampaikan dalam bentuk grafik di bawah ini.

Grafik 1. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin periode tahun 2003 – September 2018



Sumber : Profil Kemiskinan, BPS, September 2018

Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi kemiskinan dengan berbagai pendekatan, salah satunya adalah melalui kemitraan. Kemitraan dapat dipandang sebagai sebuah interaksi diantara aktor yang terlibat. Interaksi antara pemerintah dan sektor swasta lebih dikenal dengan istilah perjanjian kerjasama atau kontrak. Jenis kemitraan ini merupakan yang paling sederhana, dimana pemerintah dan sektor swasta melaksanakan perjanjian untuk melakukan tujuan bersama. Tujuan tersebut berupa pembangunan infrastruktur maupun upaya penanggulangan kemiskinan.

Jenis kemitraan lainnya dikenal dengan *Triple Helix*. Konsep ini merupakan interaksi antara aktor akademisi, industri dan pemerintah. Konsep tersebut seringkali dikenal dengan istilah ABG (*Academic, Business and Government*). Dalam konteks pembangunan, aktor tersebut mempunyai peran masing-masing. Sinergi dari ketiga sektor ini merupakan prinsip generatif dalam membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan, memungkinkan tercapainya integrasi ekonomi yang lebih erat (Wilopo, 2018).

Konsep lain tentang kemitraan adalah *Penta Helix*. Konsep tersebut merupakan interaksi antara aktor yang lebih luas meliputi kalangan akademisi, bisnis/industri, komunitas, media dan pemerintah. Berbagai aktor tersebut saling bekerjasama dalam menjalankan tujuan yang akan dicapai. Pelibatan berbagai aktor dipandang akan memberikan dampak yang besar dalam mencapai tujuan yang diharapkan oleh kerjasama tersebut.

Sehingga pada dasarnya kemitraan merupakan kebutuhan pemerintah dalam menjalankan perannya terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan dengan melibatkan berbagai aktor. Interaksi aktor dalam kerangka kemitraan tersebut merupakan bagian dari

konsep *public private partnership* (PPP).

Pada prakteknya, kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta mempunyai tujuan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) berpandangan bahwa PPP merupakan salah satu solusi untuk memecahkan permasalahan di masyarakat dengan melibatkan sumberdaya yang dimiliki oleh pemerintah, sektor bisnis dan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan pemerintah mempunyai peran untuk menyelenggarakan pelayanan publik dan untuk memenuhi kebutuhan publik (Anggaraini, 2017). Peran yang dilakukan tidak selalu dapat dikerjakan sendiri. Perlu adanya pelibatan dari aktor lain.

Kemitraan yang dilakukan pun didasarkan karena pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan dalam memecahkan permasalahan yang semakin beragam. Keterbatasan tersebut berupa anggaran, sumberdaya, teknologi dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor lain terutama sektor swasta. Kerjasama tersebut tentunya mempunyai tujuan yang spesifik

Lebih jauh, Skelcher (2007) mengungkapkan bahwa “*combine the resources of government with those of private agents (businesses or not-for-profit bodies) in order to deliver societal goals*”. Kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta tersebut pastilah mempunyai tujuan. Tujuan yang dikehendaki dapat berupa upaya penanggulangan kemiskinan.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, PPP dapat dilaksanakan melalui kemitraan pemerintah dan swasta dalam bidang infrastruktur seperti yang dilaksanakan di Asia dan Pasifik (Panggabean, 2006), pengembangan ekonomi kecil dan menengah (*Small Medium*

Enterprise/SME) yang dilakukan di Indonesia (Huda et al., 2018), Kemitraan dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Bangladesh (Khanom, 2011), serta beberapa pelaksanaan *Coorporate Social Responsibilities* (CSR) yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan (Brinkerhoff and Brinkerhoff, 2011). Kemitraan yang dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan tersebut melibatkan berbagai aktor baik pemerintah maupun sektor swasta.

Hakikat dari dilaksanakannya kemitraan adalah bahwa kemitraan dapat menyebabkan program menjadi lebih efektif (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011). Hal senada disampaikan oleh MqQuaid (2000) bahwa kemitraan mempunyai potensi manfaat yang besar seperti efektif dan efisien dalam meningkatkan program maupun layanan publik, adanya pengalihan sumberdaya pada masing-masing mitra, serta menyebabkan legitimasi yang besar terutama pelibatan aktor lain dalam kemitraan.

Setidaknya menurut *The Shorter Oxford Dictionary* (dalam Hilton, Davis and Lorraine, 2007) terdapat karakteristik kemitraan yang dipandang efektif meliputi adanya kerjasama yang erat diantara mitra dengan partisipasi dan keterlibatan diantara mitra, adanya pembagian peran/kewenangan, mempunyai kemampuan, terdapat tujuan, adanya negosiasi, adanya kepercayaan dan saling menghormati, keterbukaan dan kejujuran serta komunikasi yang baik diantara mitra.

Walaupun demikian, menurut beberapa penelitian, ada kalanya kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta mengalami ketidakefektifan dan tujuan yang tidak tercapai. Penelitian yang dilakukan oleh Klijn dan Teisman (2003) menunjukkan adanya kelemahan dalam pelaksanaan kemitraan di Belanda. Kelemahan tersebut

diantaranya kesulitan dalam pengorganisasian dan pembuatan keputusan bersama dan praktek kemitraan itu sendiri. Osborne (2000) pun mengungkapkan bahwa kemitraan tidak akan efektif jika kondisi yang menunjukkan ketiadakjelasan tujuan bersama, ketidaksetaraan posisi dalam kemitraan, serta masalah pengorganisasian kemitraan.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat kemitraan yang tidak berhasil untuk dilakukan. Suropto (2006) menyatakan bahwa kemitraan terutama yang dilakukan di Indonesia tidak berjalan dengan baik dikarenakan ketiadaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penyebab kegagalan tersebut berupa aturan yang tidak dilaksanakan sesuai dengan semestinya, serta kompetensi dan kapabilitas lembaga yang tidak mencukupi, budaya yang tidak mendukung, serta praktek KKN yang semakin meluas. Selain itu, kemitraan pemerintah dan swasta juga dapat memberikan dampak negatif berupa potensi kerugian sebagaimana disampaikan oleh MqQuaid (2000) yaitu ketiadaan tujuan yang jelas, potensi pengeluaran biaya sumberdaya yang besar disebabkan oleh pembahasan dalam pembuatan perjanjian dan keputusan, kekuatan atau kewenangan yang tidak setara diantara mitra (*unequal power*), upaya merebut kekuatan dalam melakukan kemitraan (*Cliques usurping power*), dampak dari pelayanan publik yang mempengaruhi kemitraan (*Impacts on other services*), kesulitan organisasi dalam melakukan koordinasi diantara mitra, serta mempunyai nilai yang berbeda diantara mitra yang saling bekerjasama.

Berdasarkan latar belakang tersebut, merupakan hal yang menarik untuk mengelaborasi lebih jauh permasalahan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif dan tidak menimbulkan

potensi kerugian yang dapat ditimbulkan dari adanya kemitraan tersebut. Tulisan ini lebih jauh akan membahas mengenai efektivitas kemitraan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan dan dimensi efektivitas kemitraan yang dapat digunakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Penulisan melalui studi literatur dengan mengumpulkan data, kajian, laporan, publikasi, buku maupun berita tentang efektivitas kemitraan pemerintah dan swasta. Menurut Creswell (2009), yang dimaksud dengan studi literatur adalah ringkasan tertulis mengenai artikel dari jurnal, buku dan dokumen lain yang mendeskripsikan teori serta informasi, baik masa lalu maupun saat ini, mengorganisasikan pustaka dalam topik dan dokumen yang dibutuhkan untuk suatu penelitian. Dengan melakukan studi literatur, penulis berharap mendapatkan teori serta kerangka pemikiran yang relevan dengan permasalahan kemitraan pemerintah dan swasta terutama dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

PEMBAHASAN

Konsep Kemitraan Pemerintah dan Swasta (Public-Private Partnership)

Kemitraan yang dilakukan didasarkan karena pemerintah mempunyai berbagai keterbatasan dalam memecahkan permasalahan yang semakin beragam. Keterbatasan tersebut berupa anggaran, sumberdaya, teknologi dan lain sebagainya. Dengan demikian, pemerintah melakukan kerjasama dengan sektor lain terutama sektor swasta. Kerjasama tersebut tentunya mempunyai tujuan yang spesifik. Menurut Singh & Prakash (2010) PPP telah digunakan sebagai istilah umum yang menggambarkan hubungan kolaboratif antara aktor publik dan swasta untuk pencapaian tujuan bersama. Sehingga jelas bahwa kemitraan

dijalankan untuk mencapai tujuan bersama.

Pada tataran definisi menurut Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) kemitraan pemerintah dan swasta, terdiri dari elemen pembentuk kemitraan yang terdiri dari mutualitas dan identitas organisasi. Mutualitas adalah adanya saling bekerjasama diantara pemerintah dan swasta untuk mencapai tujuan. Mutualitas mencakup komitmen yang sama pada tujuan, terdapatnya kontrol bersama dalam kemitraan dan adanya tanggungjawab bersama dalam sebuah kemitraan. Identitas organisasi merupakan suatu alasan untuk memilih mitra tertentu berdasarkan pada kompetensi, dan sumberdaya yang dimiliki oleh mitra tersebut. dalam kemitraan, kejelasan tujuan menjadi fokus tersendiri. Hal tersebut dikarenakan terdapat konsekwensi yang akan ditanggung oleh pemerintah maupun pihak swasta, Parente (2006) dan Djunaedi (2007) menanggapi kemitraan sebagai sebuah kesepakatan atau kontrak antara pemerintah dan pihak swasta dengan adanya ketentuan bahwa pihak swasta memegang sebagian tugas dan fungsi pemerintah dalam jangka waktu tertentu, dengan adanya resiko dan tanggung jawab serta profit yang akan didapatkan oleh pihak swasta tersebut.

Dalam kemitraan, terdapat istilah aktor pemerintah dan swasta (*public-private partnership*). Menurut Forre et al., (2014), sektor publik terdiri dari entitas yang diorganisir dan diatur melalui beberapa jenis struktur yang disponsori pemerintah. Prinsip-prinsip seperti kesetaraan, partisipasi warga negara, dan proses hukum terkadang sama pentingnya dengan hasil akhir. Sedangkan Sektor swasta (*for-profit sector*) terdiri dari semua individu atau organisasi yang menyediakan barang atau jasa dengan tujuan menghasilkan keuntungan. Organisasi sektor swasta terutama didorong oleh motivasi keuntungan; ukuran keberhasilan

biasanya ukuran keuangan seperti laba, laba atas ekuitas, dividen, harga saham yang terkait dengan pendapatan, dan pangsa pasar. Sehingga jelas bahwa “*public*” yang dimaksud merupakan istilah lain dari pemerintah, sedangkan “*private*” dapat dikategorikan sebagai sektor swasta maupun masyarakat secara umum.

Terdapat beberapa alasan dilaksanakannya kemitraan antara pemerintah dan swasta. Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011) menyatakan bahwa kemitraan yang dijalankan mengandung beberapa alasan: 1) untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien; 2) memecahkan masalah dengan berbagai sektor, sumberdaya, dan solusi yang terintegrasi; 3) menciptakan *win-win solution* antar sektor yang terlibat; 4) membuka proses pengambilan keputusan yang lebih luas pada barang/jasa publik. Alasan tersebut sejalan dengan pendapat Torchia et al., (2015) bahwa kemitraan membahas mengenai efektivitas, efisiensi, manfaat dan jejaring antar aktor.

Kemitraan telah menjadi salah satu solusi bagi negara-negara dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Salah satu negara yang menjalankan PPP yaitu Amerika Serikat. Kondisi negara tersebut mengalami berbagai pergeseran isu dalam memahami administrasi publik, seperti: 1) Penciptaan struktur semi-pemerintah yang memberikan lebih banyak keleluasaan kepada manajer daripada birokrasi tradisional; 2) Pertumbuhan kontrak pemerintah, baik di sektor swasta maupun nirlaba, sebagai metode pengiriman barang dan jasa pemerintah, 3) Pelimpahan tanggung jawab program dari pemerintah federal ke pemerintah negara bagian (Forre et al., 2014). Kondisi tersebut mengarah pada adanya pelimpahan kewenangan dalam pelayanan publik dari sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah kepada sektor lain. Pelimpahan sebagai urusan publik kepada pihak lainnya dikenal dengan kemitraan pemerintah dan swasta, *public-private partnership* (PPP).

Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai kondisi seseorang yang tidak mempunyai sumberdaya cukup untuk hidup (Payne, 2005). Pendapat tersebut sesuai dengan definisi kemiskinan yang disampaikan oleh Suharto (2004), membagi kemiskinan menjadi kemiskinan sempit dan kemiskinan luas. Kemiskinan sempit dicirikan dengan kurangnya kecukupan materi maupun penapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan kemiskinan luas dicirikan adanya kekurangan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, maupun kekurangan transportasi untuk menjangkau sumberdaya. Oleh karena itu, pantaslah disampaikan bahwa kemiskinan merupakan masalah utama dari perekonomian (Vinayak et al., 2006). Dalam konteks kemiskinan, pendapat dari Suharto (2004) tersebut yang dijadikan sebagai pegangan dalam upaya penanggulangan kemiskinan dalam tulisan ini.

Penyebab kemiskinan secara eksternal dikemukakan oleh Daron et al., (2006) yang berpendapat bahwa kemiskinan disebabkan oleh kondisi geografis dan institusional. Kondisi geografis dapat ditemui pada suatu negara dengan iklim yang ekstrem dan berpengaruh pada produktivitas pertanian atau adanya beban penyakit pada warga negaranya. Geografis juga dapat berupa pengembangan masyarakat terutama pada bidang pertanian, serta geografis dapat berarti beban penyakit atau burden disease (Sachs, 2000). Kondisi institusional pada pengaruh institusi suatu negara seperti adanya kepastian hukum maupun investasi dalam menggerakkan perekonomian negara. Kondisi institusional memandang bahwa perekonomian menjadi penyebab suatu negara menjadi miskin. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan masalah utama dari perekonomian (Vinayak et al., 2006).

Menurut Hagul (1985) penyebab kemiskinan secara eksternal dapat berupa: 1) ketiadaan sumberdaya alam; 2) pengembangan sumberdaya manusia suatu negara; 3) ketiadaan pekerjaan; serta 4) terdapatnya struktur masyarakat yang menghambat keluar dari kemiskinan. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Salah satu ahli menyampaikan pendapatnya mengenai penyebab kemiskinan secara internal yaitu Dalikon (dalam Manik, 1995) yang berpendapat bahwa penyebab kemiskinan dikarenakan: 1) aspek mental dari masyarakat; 2) terbatasnya keterampilan yang dipunyai; 3) tidak dapat menggunakan kesempatan yang diberikan; serta 4) adanya jumlah penduduk yang semakin besar.

Upaya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya mempunyai dua paradigma utama. Pertama paradigma neo liberal dan paradigma demokrasi ekonomi. Paradigma neoliberal mempunyai fokus pembahasan pada individu dan pasar bebas dalam memahami kemiskinan (Syahyuti, 2006). Permasalahan mendasar dari kemiskinan dalam pandangan ini adalah pada persoalan individu yang bersangkutan. Syarat agar kemiskinan berkurang/hilang dengan memberikan keleluasaan bagi pasar untuk berkembang lebih besar dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Suharto (2002) berpandangan bahwa kemunculan paradigma ini bermula dari teori-teori mengenai modernisasi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi. Indikator yang biasanya digunakan adalah adanya pendapatan nasional.

Berbeda dengan pandangan neo liberal, paradigma demokrasi sosial memandang bahwa kemiskinan merupakan persoalan struktural, bukan merupakan persoalan individual, Cheyene, O'Brien, dan Belgrave (dalam Suharto, 2006) "Kemiskinan disebabkan oleh adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat tersumbatnya akses masyarakat terhadap berbagai

sumber kemasyarakatan". Pandangan ini tidak mengindahkan pandangan neo liberal, dengan berpendapat bahwa kapitalisme perlu ada dengan dilengkapi dengan sistem negara kesejahteraan agar lebih bermanfaat.

Paradigma tersebut memandang bahwa kesetaraan dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan menjadi prasyarat penting (Syahyuti, 2006). Kemandirian dan kebebasan akan tercapai jika setiap orang mempunyai kemampuan untuk menjangkau sumberdaya seperti bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi melalui pendapatan yang memadai untuk hidup. Dengan adanya pendekatan tersebut menyebabkan peran negara sangat penting untuk mengatasi permasalahan kemiskinan.

Perbedaan dari kedua paradigam tersebut mengenai landasan teoritis, konsep kemiskinan, prinsip, penyebab sampai pada strategi dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dalam tabel 1.

Kemitraan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Beberapa alasan suatu negara melakukan kemitraan dengan sektor lain dalam upaya penanggulangan kemiskinan diantaranya (Panggabean, 2006) yaitu PPP dipandang efektif dalam membantu pemerintah merespon permintaan barang dan jasa publik, membantu pemerintah dalam melakukan sesuatu secara maksimal dengan dukungan sektor lain, serta PPP berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi pada pelayanan publik. Selain itu, kemitraan antara pemerintah dan swasta dilakukan karena pada dasarnya pemerintah mempunyai keterbatasan. Keterbatasan tersebut meliputi kemampuan, anggaran, sumberdaya maupun aspek lainnya. Alasan tersebut cukup untuk mendorong pemerintah dan swasta untuk melaksanakan kerjasama dalam optimalisasi kerja dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Tabel 1. Perbandingan teori utama dalam memahami kemiskinan.

Teori Utama	Teori Neo Liberalisme	Teori Demokrasi Sosial
Landasan teoritis	Individual	Struktural
Konsepsi kemiskinan	Kemiskinan absolut	Kemiskinan relative
Prinsip	<ol style="list-style-type: none"> 1. Residual 2. Dukungan saling menguntungkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Institusional 2. Redistribusi pendapatan vertical dan horizontal 3. Aksi kolektif
Penyebab kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelemahan dan pilihan-pilihan individu 2. Lemahnya pengaturan pendapatan 3. Lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketimpangan sosial struktural dan politik 2. Ketidakadilan sosial
Strategi penanggulangan kemiskinan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif 2. Memberikan pelatihan dan keterampilan pengelolaan keuangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyaluran pendapatan dasar secara universal 2. Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian pendapatan melalui intervensi negara

Sumber : Cheyene, O'Brien, dan Belgrave (dalam Suharto, 2006)

Menurut Torchia et al.,(2015) PPP dapat digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya adalah penanggulangan kemiskinan, *“Health, poverty alleviation and development programmes run primarily by governments can be speeded up with PPPs”*. Kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan pun dilakukan diberbagai negara seperti Amerika, Inggris dan Eropa, *“Economic development PPPs are cross-sectoral collaborations that promote economic growth and poverty reduction. In the US, Europe, and the UK, such partnerships are common at municipal, county, and state levels, with a combination of local, state, and federal funding; for example, the Mainstreet USA program”* (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011).

Pembahasan mengenai kemitraan pemerintah dan swasta sebagai upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilihat dari dua bentuk kemitraan yaitu infrastruktur maupun

pelayanan publik. Brinkerhoff & Brinkerhoff (2011), *“PPPs have traditionally been pursued for service delivery and infrastructure, achieving what refer to as iconic status within public administrations around the world”*. Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan dengan mekanisme kemitraan antara pemerintah dan swasta. Kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan pada bidang yang lebih luas yaitu bidang infrastruktur maupun layanan publik.

Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, PPP dapat dilaksanakan melalui kemitraan pemerintah dan swasta dalam bidang infrastruktur yang dilaksanakan di Asia dan Pasifik (Panggabean, 2006), pengembangan ekonomi kecil dan menengah (*Small Medium Enterprise/SME*) yang dilakukan di Indonesia (Huda et al, 2018), Kemitraan dilaksanakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Bangladesh (Khanom, 2011), serta beberapa pelaksanaan *Coorporate Social Responsibilities*

(CSR) yang dilakukan untuk penanggulangan kemiskinan (Brinkerhoff & Brinkerhoff, 2011).

Kemitraan yang dijalankan pemerintah dan swasta dalam bidang infrastruktur dilaksanakan di wilayah Asia Pasifik terutama pada aspek pendanaan dan dukungan pemerintah pada upaya penanggulangan kemiskinan melalui bidang infrastuktur. Panggabean (2006) berpendapat bahwa modalitas pendanaan kemitraan antara pemerintah dan swasta dapat dilakukan untuk masyarakat miskin. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal yaitu menciptakan lingkungan yang memungkinkan suatu kemitraan dapat dilaksanakan secara maksimal, kemudian memastikan bahwa kemitraan yang dilakukan melalui penyediaan infrastruktur oleh pemerintah dan swasta tersebut berdampak baik bagi upaya penanggulangan kemiskinan.

Langkah-langkah tersebut dapat dilakukan secara praktis dengan melakukan empat hal utama. Pertama, mengintegrasikan kemitraan pemerintah dan swasta dalam setiap strategi penanggulangan kemiskinan yang dilakukan pemerintah. Kedua, memastikan berbagai pertimbangan bahwa kemiskinan adalah salah satu tujuan dari proses dilaksanakannya kemitraan. Langkah ini mengharuskan kerangka kemitraan yang tepat, dan menggabungkan dengan tujuan dilakukannya infrastruktur, pemberian layanan yang kompetitif serta desain kebijakan tarif yang baik. Ketiga, regulasi yang pro masyarakat miskin. Keempat, struktur pendanaan yang baik.

Kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta dalam pengembangan ekonomi kecil dan menengah yang dilakukan di Kota Sidoarjo, Jawa Timur menunjukkan bahwa kebijakan kemitraan yang dipimpin oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengatasi permasalahan

kesenjangan pertumbuhan belum berjalan dengan optimal. Dengan demikian tujuan yang akan dicapai oleh pemerintah dengan menciptakan kemitraan bisnis yang saling menguntungkan antara supermarket dan usaha kecil menengah (UKM/SME) tidak dapat tercapai. Perlu dilakukan evaluasi tentang kemitraan yang dilakukan seperti pada peningkatan sumberdaya manusia, komunikasi yang dijalan antara organisasi komunikasi dan kegiatan penguatan, serta disposisi pelaksana.

Kemitraan dilaksanakan di Bangladesh sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Khanom (2011), menyatakan bahwa PPP diasumsikan efektif untuk mengurangi kemiskinan karena terlihat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang langka, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan efisiensi. Pemerintah Bangladesh telah mengakui penggunaan PPP sebagai pendekatan inovatif dan efektif untuk pengentasan kemiskinan di Bangladesh.

Dengan demikian, pada dasarnya kemitraan antara pemerintah dan swasta dilakukan dalam berbagai bidang sebagai upaya dalam penanggulangan kemiskinan. Kemitraan tersebut bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan terutama di berbagai negara berkembang seperti Indonesia, Bangladesh, serta negara di kawasan Asia Pasifik.

Efektivitas Kemitraan dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Efektivitas kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta pada dasarnya dapat dibahas menggunakan beberapa model kemitraan. Dalam pembahasan ini, terdapat dua model yang dapat digunakan yaitu model Kemitraan MqQuaid (2000) dan Model Berdasarkan Tujuan (*purpose base framework*) yang disampaikan oleh Brinkerhoff &

Brinkerhoff (2011). Pemilahan model tersebut berdasarkan pada kajian yang dilakukan terutama dalam pengembangan ekonomi sebagai bagian dari upaya penanggulangan kemiskinan disuatu wilayah. Pembahasan efektivitas tersebut dilakukan dengan beberapa dimensi yang dapat digunakan untuk melihat seberapa efektif kemitraan yang dilakukan antara pemerintah dan swasta dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Pertama, Model kemitraan yang ditawarkan oleh MqQuaid (2000) melihat kemitraan sebagai gabungan dari serangkaian karakteristik dan dimensi yang berbeda dalam membentuk kemitraan. Konteks kemitraan dalam model ini adalah pada *urban regeneration* dan *economic development*. Pembangunan ekonomi (*economic development*) dipandang sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan pendapatan dapat digunakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan. Untuk melihat efektivitas kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penanggulangan kemiskinan dapat menggunakan dimensi yang disampaikan oleh Ronald MqQuaid.

Beberapa dimensi yang dikemukakan oleh MqQuaid yaitu “(1) *what the partnership is seeking to do—i.e. its purpose and whether it is strategic or project driven*; (2) *who is involved—i.e. the key actors and the structure of their relationship in the partnership*; (3) *when—i.e. the timing or stage of development of the partnership process and changing relationships and activities over time*; (4) *where—i.e. the spatial dimension*; (5) *how the activities are carried out, the implementation mechanisms*”.

Menurutnya, dimensi yang dapat digunakan untuk melihat efektivitas suatu kemitraan antara pemerintah dan swasta terutama dalam konteks penanggulangan kemiskinan yaitu apa yang

akan dilakukan yang terdiri dari apa tujuan dari kemitraan tersebut dan apakah tujuan tersebut sangat strategis untuk dilakukan. Aktor yang terlibat terdiri dari aktor kunci dari kemitraan yang dilakukan tersebut serta bagaimana struktur hubungan yang terjadi diantara mitra-mitra yang saling bekerja bersama. Dimensi waktu pun memegang peranan penting dalam aktivitas kemitraan, tahapan proses kemitraan yang dijalankan dengan alokasi waktu yang ada sehingga kemitraan dapat dijalankan dengan baik. Dimensi tempat, menunjukkan lokasi dari kemitraan yang dijalankan antara pemerintah dan swasta. Serta dimensi mekanisme implementasi, menunjukan bagaimana kemitraan dijalankan untuk mencapai tujuan bersama. Dalam tulisannya, MqQuaid merumuskan dimensi tersebut ke dalam bentuk tabel seperti yang disampaikan pada tabel 2.

Salah satu penelitian di Indonesia mengenai PPP dapat dianalisis menggunakan model Ronald W. MqQuaid (2000) untuk melihat efektivitas kemitraan. Penelitian tersebut dilakukan oleh Abbas (2018) dengan judul *Public Private Partnership Dalam Pembangunan dan Pengelolaan SunCity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) Antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indraco)*.

Dalam melihat efektivitas kemitraan digunakan indikator yaitu tujuan kemitraan, siapa yang terlibat, jangka waktu kemitraan, dimana terkait lokasi/tempat, serta indikator bagaimana meliputi skema kemitraan. Hal tersebut untuk memberikan kepastian pada kemitraan yang terjadi dan interaksi antar mitra.

Kemitraan dalam bentuk BOT yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indraco bertujuan untuk membangun dan mengelola SunCity Plaza. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan

Tabel 2. Model Kemitraan Ronald W. MqQuaid

RangRange/example	Components	Range/examples
Purpose Exogeneous (external resiuces) Employment creation Single Project Strategic	Focus Aims Range of activities Level	Endogenous (internal resources) Employment redistribution Long term programme Programme cooperation or one-off project collaboration
Who is involved Public agencies Formal (legal contract-general agreements) Top-down	Range of actors Structure	Private,voluntary, 'thrid sector' Informal (overlapping network)
Unequal power	Process of mobilization Power relationship	Bottom-up 'Fair' power relationship
When Pre-development/development Close partnership	Phase/stage Decision points	Operation Continue partnership
Where Geographical area (e.g. small urban area)	Area/group	Client group (e.g. young unemployed in the region)
How Stand-alone partnership organization	Implementation mechanisms	Agreement influencing existing service

Sumber: Ronald W. MqQuaid (2000)

dengan investor tunggal. Lokasi pembangunan infrastruktur merupakan tanah bekas lapangan golf dengan memberikan hak guna bangunan. Lokasi ini masih dianggap sebagai tanah desa oleh sebagian masyarakat walaupun kepemilikan sudah berpindah ke pemerintah kabupaten. Pemilihan lokasi menjadi salah satu indikator penting dalam pelaksanaan *public private partnership* karena terkait dengan keberlanjutan kerjasama. Ketika lokasi yang ditempati merupakan lokasi dalam sengketa maka akan mempengaruhi pelaksanaan kemitraan tersebut. Jangka waktu kemitraaan cukup lama yaitu 30 tahun dengan skema 25 tahun untuk pengelolaan oleh pihak swasta dan 5 tahun untuk masa persiapan dialihkan kepada pemerintah daerah. Kemitraan yang dilakukan memberikan keuntungan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks pengelolaan dan pembangunan, pemerintah dan pihak swasta menetapkan bentuk kemitraan BOT yaitu pembangunan oleh investor atau pihak swasta, sedangkan pemerintah memberikan berbagai kemudahan seperti penyediaan lahan, keringanan ijin mendirikan bangunan, pembebasan pajak hotel dan pajak restoran selama 3 tahun, keringanan pajak PLN dan reklame, serta kemudahan dalam pemasangan saluran air PDAM.

Kedua, Model kerangka kemitraan berdasarkan pada tujuan (*purpose base framework*). Model ini disampaikan oleh Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) dalam tulisannya yang membahas mengenai upayanya dalam membuat kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan-tujuan yang akan

dicapai. Model ini berusaha untuk melihat kemitraan dalam aspek pembentukannya. Hal tersebut dikarenakan belum banyak referensi yang mencoba untuk menganalisis model dengan berdasarkan pada tujuan. *It offers a discussion of partnership definitions and builds a framework that examines the features of PPPs as they relate to achieving particular purposes: policy, service delivery, infrastructure, capacity building, and economic development.* Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) berupaya untuk membuat kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan. Kerangka tersebut terdiri dari tujuan untuk membuat kebijakan (*policy*), pelayanan publik (*service delivery*), infrastruktur, pembangunan kapasitas serta pengembangan ekonomi (*economic development*).

Model kerangka kerja kemitraan yang ditawarkan untuk melihat efektivitas kemitraan dalam upaya penanggulangan kemiskinan adalah tujuan pengembangan ekonomi (*economic development*). *Economic Development PPPs* adalah kolaborasi lintas sektoral yang mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan. Kemitraan semacam itu biasa terjadi di tingkat kota maupun kabupaten, dengan kombinasi pendanaan lokal, provinsi, dan pusat. Dalam kategori ini banyak kemitraan yang lahir di sisi sektor swasta dari program tanggung jawab sosial perusahaan dan komitmen untuk garis bawah dua atau tiga. Pemerintah dan mitra donor internasional sering memainkan peran perantara, baik dalam hal keuangan dan mencocokkan perusahaan swasta dengan LSM dan/atau masyarakat lokal. Di tingkat global, PPP bertujuan untuk mobilisasi sumber daya, seringkali untuk kontribusi spesifik sektor terhadap pembangunan ekonomi di negara-negara miskin. Model tersebut melihat bagaimana kemitraan dapat memberikan

peluang pada upaya penanggulangan kemiskinan dengan mekanisme berbagi tanggung jawab pihak swasta. Konsep tersebut dikenal dengan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Dimensi yang dapat digunakan dalam melihat efektivitas kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan menurut Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) yaitu *Equity, Social inclusion, and Empowerment*. Dimensi-dimensi tersebut menghendaki pada upaya keadilan bagi penduduk miskin dalam mendapatkan bantuan dari program-program CSR yang dijalankan tersebut. Inklusi Sosial mengamanatkan pada upaya bahwa upaya penanggulangan kemiskinan khususnya untuk mencapai inklusi. Pemberdayaan (*empowerment*) diharapkan terjadi dengan adanya kemitraan yang dijalankan antara pemerintah dan swasta. Kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan yang disampaikan oleh Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) seperti dalam tabel 3.

Salah satu penelitian mengenai CSR dilakukan oleh Putri (2016) dengan judul *Kemitraan Pemerintah-Swasta Dalam Program Corporate Social Responsibility Di Kabupaten Pasuruan*. Penelitian ini membahas salah satu dimensi dari tujuan PPP *Economic Development* yang dikemukakan oleh Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011) yaitu pemberdayaan (*Empowerment*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dilakukan antara Pemda Kabupaten Pasuruan dengan PT HM Sampoerna bertujuan untuk memberdayakan masyarakat terutama di wilayah Kecamatan Sukorejo. Program pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh HM Sampoerna dengan secara aktif menggali kebutuhan dan melibatkan pemerintah daerah dalam program-program tersebut seperti cara berdagang dan pelatihan manajemen bisnis secara keseluruhan. Program CSR yang ditawarkan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sebagian besar

Tabel 3. Kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan.

PPP purpose	Organizational structure and processes	Performance metric	Normative dimensios
Policy	Network Task force Joint committee Special commission	Technical quality Responsiveness Concensus-building Legitimacy	Equity/representativeness Citizen participation Transparancy
Service Delivery	Co-production Joint venture Contract Partnership Agreement (MoU)	Quality Efficiency Effectiveness Reaching targeted beneficiaries	Accountability Business value and incentives Access Responsiveness
Infrastructure	Joint venture Build-operate-transfer Build-operate-own-transfer Design-build-operate	Quality Efficiency Value for money Maintenance and sustainability	Accountability Business value and incentives Access Responsiveness
Capacity Building	Knowledge network Twinning Contract Partnership Agreement (MoU)	Skills transfer Intellectual capital Social capital Organizational system and output	Ownership Agency Empowerment Autonomy/Independence
Economic Development	Joint venture Contract Partnership agreement	Poverty reduction Profitability Sustainability	Equity Social inclusion Empowerment

Sumber. Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011)

merupakan petani. Kegiatan pelatihan menjadi salah satu cara pemberdayaan masyarakat petani menjadi lebih baik, terutama dalam memasarkan produknya. Sehingga program CSR tersebut efektif dilaksanakan karena mempunyai salah satu dimensi yaitu pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang dikemukakan oleh Brinkerhoff and Brinkerhoff (2011).

Sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat lebih efektif dan tidak menimbulkan potensi kerugian dapat dilakukan dengan menggunakan model yang disampaikan oleh Ronald MqQuaid yang terdiri dari tujuan dari kemitraan, optimalisasi aktor kunci, mengefektifkan waktu, tempat, serta mekanisme pelaksanaan yang jelas dari kemitraan tersebut. Dimensi lainnya dalam meningkatkan efektivitas kemitraan disampaikan oleh Brinkerhoff & Brinkerhoff seperti kesetaraan, inklusi sosial serta pemberdayaan.

PENUTUP

Untuk mencapai efektivitas kemitraan dalam upaya penanggulangan kemiskinan serta mencegah terhadap berbagai potensi kerugian dari kemitraan pemerintah dan swasta, maka penulis menyajikan dua model pendekatan yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Model pertama yaitu model kemitraan yang disampaikan oleh Ronald MqQuaid yang menyajikan karakteristik dan dimensi dalam membentuk kemitraan. Model ini dapat dilakukan untuk melihat efektivitas kemitraan karena konteks kemitraan pada model ini berada pada tataran pengembangan ekonomi perkotaan. Dimensi yang disampaikan diantaranya tujuan dari kemitraan beserta strategi melaksanakan kemitraan, aktor yang terlibat, waktu dan jangka waktu kemitraan, tempat yang menandakan jangkauan lokasi kemitraan, serta aspek mekanisme pelaksanaan kemitraan.

Model lain yang dapat digunakan dalam melihat efektivitas kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dan digunakan untuk menghindari potensi kerugian karena pelaksanaan kemitraan, yaitu model kerangka kerja kemitraan berdasarkan pada tujuan. Model tersebut membahas mengenai kemitraan dari aspek tujuan yang akan dilaksanakan dalam kemitraan. Beberapa tujuan yang menjadi kajian dari model ini yaitu kebijakan, pelayanan publik, infrastruktur, pengembangan kapasitas serta pengembangan ekonomi. Upaya penanggulangan kemiskinan dapat dikategorikan sebagai bagian dari tujuan pengembangan ekonomi. Dimensi yang digunakan dalam melihat efektivitas kemitraan diantaranya yaitu *equity, social inclusion, serta empowerment*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Moeh Yafie. (2018). Public Private Partnership Dalam Pembangunan dan Pengelolaan SunCity Plaza Sidoarjo (Model Perjanjian Build Operate Transfer (BOT) antara Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dengan PT Indraco). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol 6, Nomor 3, September-Desember 2018.
- Anggraini, Shintia. (2017). *Public Private Patnership* dalam Pengembangan Program Sidoarjo Bersih dan Hijau di Kabupaten Sidoarjo (Studi Deskriptif Kemitraan Antara Radar Surabaya Dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sidoarjo). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol 5, Nomor 1, Januari-April 2017.
- Badan Pusat Statistik. (2018). *Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2018*. Nomor. 57/07/ Th XXI, 16 Juli 2018. Jakarta.
- Barrientos, Armando. (2010). Social Protection and Poverty. *Social Policy and Development Programme Paper* Number 42 January 2010. United Nations Research Institute for Social Development.
- Brinkerhoff, Derick, W., & Jennifer, M, Brinkerhoff. (2011). Public-Private Partnership: Perspective on Purpose, Publicness, and Good Governance. *Public Administration and Development, Public Adm. Dev.* 31, 2-14.
- Creswell, John W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (3rd ed). USA: Sage Publication.
- Fombad, Madeleine. (2018). Knowledge management for poverty eradication: a South African perspective. *Journal of Information, Communication and Ethics in Society*, Vol. 16 Issue: 2, 193-213.
- Hagul, Peter. (1985). *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Hilton, Davis and Lorraine. (2007). *Working In Partnership Through Early Support: Distance Learning Text (Working with Parents In Partnership)*. Departemen: Education and Skill.
- Huda, Ary, Miftahul., Antun, Mardiyanta., & Erna, Setijaningrum. (2018). Canpublic-private partnership policy reduce poverty and grow sustainable economies in indonesia? (case study approach). *E3S Web of Conferences* 74, 01005 (2018). ICSolCA 2018.
- Klijjn, E.H. and Teisman, G.R. (2003). Institutional and strategic Barriers to Public-Private Partnership: An Analysis

- of Dutch Cases, *Public Money and management*.
- Khanom, N. A. (2011). *Partnership for Development: Alternative Approaches to Poverty Alleviation in Bangladesh*. Australia: University of Canberra.
- Kotler, Philip., & Nancy R. Lee. (Ed.). (2009). *Up and Out of Poverty: The Social marketing Solution*. New Jersey. Wharton School Publishing.
- Manik, WW. (1995). *Penelitian Evaluatif tentang Pelaksanaan PBS dalam Penyantunan dan Pengentasan Fakir Miskin di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah*. Yogyakarta: B2P3KS.
- McQuaid, Ronald, W. (2000). *The Theory of Partnership: Why have Partnership*. In Stephen Osborne (Ed.). *Public Private Partnership: Theory and Practice in International Perspective*. New York: Routledge.
- Osborne, Steven. (2000). *Public Private Partnership: Theory and Practice in International Perspective*. New York: Routledge.
- Panggabean, Adrian, TP. (2006). Expanding Acces to Basic Service in Asia and The Pacific Region: Public-Private Partnership for Poverty Reduction. *ERD Working Paper No.87 Philippines*: Asian Development Bank.
- Payne, Ruby, K.(2005). *A Framework for Understanding Poverty*. Fourth Revides Edition. Texas: Aha! Process, Inc p. 7.
- Putri, Magya Ramadhania. (2016). *Kemitraan Pemerintah-Swasta dalam Program Corporate Social Responsibility di Kabupaten Pasuruan*. *Jurnal Kebijakan dan Publik Manajemen (JKPM)* Vol 4 No.2 September 2016 hal 117-234.
- Sachs, Jeffrey. (2005). *The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time*. New York: Penguin Press.
- Singh, A.,& Prakash, G.(2010). Public–Private Partnerships in Health Services Delivery: A Network Organizations Perspective. *Public Management Review*, 12: 6, 829–56.
- Smeru Research Institue. (2017). From MDG’s to SDG’s: Lesson Learn From NTB and Tangible Step Forward. *Smeru Newsletter Nomor.2/2017*.
- Suharto, Edi. (2004). *Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia*. Bandung: STKS Press.
- (2006). *Konsep dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial* (Artikel).
- Sumodiningrat, G. (September, 2003). *Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Era Otonomi Daerah* (Makalah disampaikan pada Rakerda Penanggulangan Kemiskinan di Ambon Maluku tanggal 5-6 September 2003).
- Suripto. (2006). The Accountability and Transparency of Partnership Programs at The Local Level: A Case Study for the Management of Contracting Out at The Regency of Sleman. *Journal of Sosiosains*. Volume 19 No I. Januari 2006.
- Syahyuti.(2006).30 *Konsep Penting dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian*,

Penjelasan konsep, istilah, teori, dan indikator serta variable. Jakarta: Bina Rena Pariwara.

Torchia, Mariateresa., Andrea, Calabro., & Michele, Morner.(2015). Public-Private Partnership in The Health Care Sector: A Systemic Review of The Literature. *Public Management Review* Vol 17 No. 2, 236-261.

Wilopo,M.Fakhrul Izzati.(2018).Implementasi *Triple Helix* dalam Mendorong Pertumbuhan Industri Kreatif di Kota Malang Sebagai Upaya Peningkatan Daya Saing untuk Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 55 No. 1 Februari 2018.

Vinayak, Banerjee, Abhijit,. Roland, Benabou,& Dilip, Mookherje.,(2006). *Understanding Poverty.* New York: Oxford University Press Inc.